ISSN : 2354-5925

EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI PUSKESMAS LIBURENG KABUPATEN BONE

Reski Fatmala
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Fakhri Kahar
Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar
Email: f.kahar@yahoo.com

ABSTRAK

Efektivitas Program Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Puskesmas Libureng Kab.Bone. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak H. Fakhri Kahar dan Bapak Haedar Akib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di puskesmas libureng kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui cara triangulasi, dan member check. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penrikan kesimpulan. Hasil penelitian meunjukkan bahwa efektivitas program pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di puskesmas libureng kabupaten Bone sudah berjalan efektif. Hal ini di dasari atas ketepatan sasaran program yang sudah sesuai, sosialisasi sudah baik, tujuan program yang sudah tercapai, serta pemantauan program yang sudah baik.

Kata Kunci: *Efektivitas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Puskesmas*

1. Latar Belakang

Kesehatan mempunyai peranan penting dalam hidup masyarakat, karena kesehatan merupakan aset kesejahteraan badan, jiwa, sosial bagi setiap individu. Kesehatan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia dimana sejak zaman dahulu kala, telah banyak dilakukan upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan diri

ISSN : 2354-5925

maupun kelompok.[10] Menurut UU No.36 Tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[11]

Pembangunan kesehatan di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya kesehatan bersifat komperehensif dan holistik. Tujuannya agar tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk di Indonesia. Untuk itu maka diperlukan pelayanan kesehatan yang merata dengan kulitas pelayanan yang baik. Tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional dapat dilihat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.[12]

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian peningkatan kesehatan tersebut, termasuk di dalamnya merupakan jaminan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang miskin, adalah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan, mulai dari Jamkesmas, Jamkesda, namun program tersebut belum efektif. Hingga akhirnya beralih kepada Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membentuk dua badan penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan[13].

Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan adalah hasil transformasi dari akses, jamkesda atau jamkesmas. BPJS kesehatan dibedakan menjadi tiga kategori dalam kepesertaan yaitu BPJS Mandiri atau Individu, BPJS Pekerja Penerima Upah (PPU), dan BPJS Peserta Bantuan Iuran (PBI). BPJS Ketenagakerjan adalaah program pemerintah yang memberikan jaminan sosial ekonomi untuk setiap pekerja Indonesia, setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dengan iuran bulanan yang sebagian ditanggung

[10]Achmad Farich.2012. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Jatirejo: Gosyen Publishing. Hal.1
[11]UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
[12]Ibid.p.pasal 3

[13]UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs)

ISSN : 2354-5925

oleh perusahaan. Adapun yang akan peneliti teliti ialah BPJS Kesehatan dengan kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini melayani berbagai lapisan dari kalangan masyarakat. Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan ditujukan untuk memberikan proteksi agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses kesehatan secara merata.

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone memiliki jumlah penduduk sebanyak 31.816 jiwa, dengan jumlah 27.034 peserta Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Adanya program jaminan kesehatan nasional BPJS kesehatan ini sangat membantu masyarakat untuk meringankan biaya pengobatannya, sehingga pada saat sekarang ini banyak ditemui pasien yang menggunakan layanan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Salah satu bentuk upayah pemerintah dalam menyelenggarakan kesehatan kepada masyarakat maka di tiap kecamatan dibangun instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut Puskesmas. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan perspektif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.[14]

Puskesmas Kecamatan Libureng selalu berusaha melayani dengan baik dalam segala kebutuhan perawatan meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan, dan rehabilitas (pemulihan kesehatan) dengan harapan pasien

[14]Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

yang memperoleh pelayanan kesehatan merasa terlayani dengan baik.

Namun dalam melaksanakan nya tidak terlepas dari permasalah-permasalahan yang terjadi. Dalam observasi penelitian, peneliti menemukan beberapa masalah diantaranya masih terdapat pelayanan yang belum baik, yaitu pelayanan dokter yang dirasakan kurang karena dokter yang kurang komunikatif dengan pasien dan keluarganya, pelayanan petugas yang kurang memuaskan karena kurang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan pasien serta kelalaian petugas dalam menangani pasien. Berdasarkan paparan diatas, judul dari penelitian ini adalah **"Efektivitas Program Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Libureng Kab. Bone."**

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Konsep Efektivitas

1) Pengertian Efektivitas

Defenisi Efektivitas menurut Mahmudi (2015:86), efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan".[15] Demikian pula defenisi menurut Bungkaes (2013:9) mengemukakan efektivitas sebagai berikut:

Gibson et.al dalam Bungkaes (2013:9) menyatakan bahwa "Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka". [16]

Menurut Pasolong (2017:4), bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan dalam istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan".[17]

Defenisi lain Menurut Gie dalam Budiani (2007:52) menyebutkan bahwa efektivitas aadalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki. Maka pekerjaan tersebut dikatakan efektif bila menimbulkan

[15]Mahmudi. 2015 .*Manjemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.Hal.86
[16]Ibid. p. 9
[17]Harbani Pasolong. 2017. Teori Adminsistrasi publik. Bandung: Alfabeta. Hlm.4

akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.[18]

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu hasil dan tujuan yang sudah direncanakan dan tolak ukur sejauh mana sebuah program dapat melaksanakan kegiatan atau fungsinya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Pengukuran efektivitas

Menurut Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2007:3) bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: [19]

a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumya. Menurut Makmur (2011:8) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik diterapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang diterapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan program kegiatan itu sendiri.[20]
b. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggaraaan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Menurut Winardi dalam Yuliani (2017:30), pengawasan meliputi tindakan menegecek dan membandingkan hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. [21]

b. Konsep Pelayanan Kesehatan

[18]Ni WayanBudiani.2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna. Dempasar : Jurnal Ekonomi Dan Sosial*.Input Volume 2 No.1

[19]Monica Pertiwi, Herbasuki Nurcahyanto. 2009.*Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang*. INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial.Hlm.3

[20]Ibid.p.8

[21]Kartika Febri Yuliani 2017.*Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) Di Kota BandarLampung.* Fakultas ilmu Sosial dan Politik. Universitas Lampung.Hal.30

1) Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat derajat kesejahtraan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu tolak ukur kepuasan yang berefek terhadap keinginan pasien untuk kembali kepada institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang efektif tersebut. Menurut Tando (2013:5) bahwa Pelayanan kesehatan bermutu dapat berarti upaya maksimum yang mampu diberikan oleh petugas pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu, serta memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien dengan tujuan untuk semakin menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh suatu tempat pelayanan kesehatan. [22]

Pohan dalam Hartono (2016: 4031) merumuskan pelayanan kesehatan sebagai berikut Suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan dalam teknologi oprasional, sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terkait dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia pelayanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan ataupun manajemen organisasi layanan kesehatan, dan akan bertanggung gugat dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.[23]

Pelayanan kesehatan merupakanpelaksanaan pemeliharaan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secaraoptimal. Pelayanan kesehatan ialah sebuah rancangan yang digunakan dalam membagikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Menurut Levey dan Loomba (1973) dalam Azwar Asrul (2010), bahwa Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.[24]

Berdasarkan teori diatas, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Pelayanan kesehatan dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk memelihara,

[22]Tando. 2013. *Mutu Layanan Kebidanan Dan Kebijakan Kesehatan*. Manado : Presindo. Hal.5

[23] Tri Yudi Hartono. 2016.*Efektivitas Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda.* E-jurnal administrasi negara, 4 (2).

[24]Azrul Azwar.2016. *Pengantar Administrasi Kesehatan*.Tangeran Selatan : BINAPURA AKSARA Publisher.Hal.42

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pasien dengan memberi pelayanan yang efektif dan efisien.

2) Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan

Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan diatur dalam pasal 53 UU kesehatan yaitu:

a. Pelayanan kesehatan perseorangan diajukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga,
b. Pelayanan kesehatan masyarakat diajukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

c. Badan Penyelenggara Jaminnan Sosial (BPJS)

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah Badan hukum yang dibentuk dengan UU BPJS untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 membentuk dua BPJS, yaitu :

1. BPJS Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. BPJS Ketenagakerjaan, berfungsi meyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.[25]

BPJS Kesehatan adalah hasil transformasi dari akses, jamkesmas atau jamkesda. Dulu sebagian orang mengenal akses, sekarang akses sudah tidak ada dan ditransformasi menjadi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan fokus utamanaya adalah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga negara indonesia tua maupun muda bahkan sampai bayi, dan berlaku juga untuk warga asing yang sudah tinggal di indonesia minimal selama 6 bulan.

BPJS bertanggung jawab kepada Presiden. Organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Anggota Direksi BPJS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden menetapkan Direktur utama. BPJS diawasi oleh pengawas internal dan pengawas ekternal. Pengawasan

[25]Susatyo Herlambang.2016.*Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*.Jatirejo:Gosyeng Publishing. Hal.61

ISSN : 2354-5925

internal dilaksanakan oleh organ BPJS, yaitu Dewan Pengawas sebuah unit kerja di bawah Direksi yeng bernama Satuan Pengawas Internal. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh badan-badan di luar BPJS, yaitu DJSN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Kerangka Konsep

Seiring dengan kemajuan teknologi dibidang kedokteran dan kesehatan, maka mutu layanan berkualitas harus pula ditingkatkan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, salah satu bentuk peran pemerintah yaitu adanya Jaminan Kesehatan (JKN) melalui BPJS kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehataan.

Puskesmas Libureng Kabupaten Bone merupakan salah Satu Puskesmas yang harus mampu memberi pelayanan yang baik kepada pengguna BPJS kesehatan. Namun tidak sedikit masyarakat yang memberikan keluhannya seperti, pelayanan dokter yang dirasakan kurang karena dokter yang kurang komunikatif dengan pasien dan keluarganya, pelayanan petugas yang kurang memuaskan karena kurang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan pasien serta kelalaian petugas dalam menangani pasien. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakanBudiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2007:3) mengenai variabel-variabel dalam mengukur efektivitas program yaitu, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan beberapa peninjauan secara ilmiah dan sistematis, Efektivitas program pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Puskesmas Libureng Kab. Bone, maka diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

a. Ketepatan sasaran program

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menggunakan jaminan sosial. Jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berguna menjamin warga negara atau masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial ini dimulai dari Jamkesmas, Jamkesda, AKSES dan muncul program baru pemerintah yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Dalam konsep Budiani dalam pertiwi dan Nurcahyanto (2007:3) menjelaskan bahwa “ ketepatan sasaran program adalah sejauh mana

peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.[26] Sasaran program merupakan target dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang hendak dicapai. Untuk itu banyak masyarakat yang ditemui di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan untuk memperoleh perawatan, maupun pengobatan di Puskesmas Libureng.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa Puskesmas Libureng Kabupaten Bone telah melaksanakan salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan ialah prolanis yang merupakan program yang dikhususkan untuk lansia usia 50-60 tahun yang rutin diadakan satu bulan sekali, memperoleh pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan komsusmsi secara gratis. Untuk mendapatkan pelayanan gratis tersebut peserta harus mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Puskesmas.

b. Sosialisasi program

Dalam Konsep Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2007:3) menjelaskan bahwa "sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaraan peserta program pada khususnya,"[27] oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan agar semua informasi tersampaikan dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat agar tujuan yang direncanakan bisa tercapai dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat pengguna kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dapat dilihat bahwa pegawai Puskesmas sudah memiliki kemapuan dalam menyampaikan materi dan bersosialisasi dengan baik hal tersebut dikarenakan di Puskesmas libureng sebelumnya telah membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan program-program terkait BPJS kesehatan dimasyarakat, sehingga pegawai yang bersosialisasi dimasyarakat sudah baik dan lancar dalam menyampaikan materi. Setelah melaksanakan sosialisasi diadakan evaluasi untuk mengetahui kesalahan-kesalahan maupun kekurangan dalam sosialisasi tersebut sehingga sosialisasi kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik. Adanya sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan ini diharapkan masyarakat dalam hal ini

[26] Moinica Pertiwi, Loc.cit.3

[27] Ibid. 3

peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dapat mengetahui, memahami, dan mendapatkaan pelayanan kesehatan secara optimal dari program ini. Namun hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut ialah kurangnya peralatan atau media yang digunakan dalam pelaksanannya, seperti LCD, dan SoundSystem, Pihak Puskesmas hanya menggunakan Pamflet.

c. Tujuan Program

Pemerintah Kabupaten Bone bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan terus berusaha untuk mencapai tujuan dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan ini. Begitu juga dengan Puskesmas Libureng Kabupaten Bone sebagai penyelenggara dan pelaksana program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, harus mampu memenuhi kebutuhan kesehatan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Budiani dalam pertiwi dan Nurcahyanto (2007:3) menjelaskan "tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya."[28] Tujuan dari program BPJS kesehatan adaalah mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehataan yang layak bagi setiap peserta sebagai pemenuhan kebutuhaan dasar hidup penduduk indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa tujuan dari program BPJS kesehatan sudah tercapai meskipun masih terdapat hambatan-hambatan dalam pencapaian tersebut. Hal ini didasari atas upaya-upaya yang telah dilakukan puskesmas untuk membantu pencapaian program tersebut, salah satunya adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta pemberian pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat seperti kemudahan untuk mendapatkan pengobatan gratis serta pelayanan saat pasien berobat sudah baik.

d. Pemantauan Program

Dalam konsep Budiani dalam pertiwi dan Nurcahyanto (2007:3) menjelaskan bahwa " pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program."[29] Pemantauan perlu dilakukan agar dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai atau tidak dengan rencana sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa pemantauan program di puskesmas libureng sudah berjalan efektif hal ini

[28] Ibid.3

[29] Ibid.3

dapat dilihat dari bentuk pemantauan yang dilakukan di Puskesmas Libureng ialah pendeteksian data baik secara online maupun manual berupa data kunjungan sakit dan kunjungan sehat, pemantauan tersebut diperiksa oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Hasil dari pemantauan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya evaluasi untuk melihat apakah program tersebut berhasil dilakukan atau belum. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung, lebih dari itu evaluasi juga menilai apa yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan, pemantauan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan bertujuan umtuk memastikan kualitas fasilitas kesehatan tetap optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

4. PENUTUP

a. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektivitas Program Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone. ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Program BPJS kesehatan yang telah dilaksanakan di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone sudah sesuai hal ini dapat dilihat dari program prolanis yang rutin dilaksanakan di puskesmas libureng setiap satu bulan sekali, program prolanis merupakan salah satu program BPJS kesehatan yang dikhususkan untuk lansia.
2. Sosialisasi program yang dilakukan oleh pegawai Puskesmas Libureng Kabupaten Bone sudah baik, dilihat dengan adanya tim khusus yang bertanggung jawab mensosialisasikan program-program terkait BPJS kesehatan dimasyarakat.
3. Tujuan dari program BPJS kesehatan sudah tercapai meskipun masih terdapat hambatan-hambatan dalam pencapaiannya.
4. Pemantauan program di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone sudah efektif baik hal ini dapat dilihat dari pemantauan yang dilakukan berupa pendeteksian data baik secara online maupun manual.

b. IMPILIKASI

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dalam hal ini efektivitas program yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas Libureng Kab.Bone sudah efektif. Berujuk pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

c. Saran

1. Perlu meningkatkan fasilitas kesehatan agar pemberian pelayanan dapat maksimal demi meningkatkan kepuasan peserta BPJS kesehatan. Untuk peserta yang anggota keluarganya belum memiliki BPJS kesehatan untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta sehingga dapat mendukung pelaksanaan program yang telah dirancang oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang kesehatan.
2. Diharapkan pihak-pihak yang bertugas dan bertanggungjawab memberikan sosialisasi terus meningkatkan serta lebih menggalakkan lagi sosialisasi program BPJS kesehatan kepada seluruh masyarakat dan juga menjangkau seluruh lapisan masyarakaat.
3. Perlu meningkatkan pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh peserta BPJS kesehatan sehingga dapat mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta.

6. Daftar Pustaka

Buku

AzwarAzrul.2016. *Pengantar Administrasi Kesehatan*.Tangeran Selatan : BINAPURA AKSARA

Farich Achmad.2012. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Jatirejo: Gosyen Publishing.

Herlambang Susatyo.2016.*Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.* Jatirejo: Gosyeng Publishing.

Hikmawati Fenti.2017. *Metode Penelitian.* Depok:Rajawali Pers

Mahmudi. 2005. *Manjemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebujakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : Refika Aditama.

Moleong Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Miles, M.B, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Ed. 3. USA : Sage Publication

Pasolong Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.

Purwoastuti Endang & Siwi Walyani Elisabeth. 2015. *Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kebidanan*.Yogyakarta: PUSTAKA BARU PPRESS.

Satrianegara Fais. 2014. *Organisasi dan Manjemen Pelayanan Kesehatan (teori dan Aplikasi dalam Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit*).Jakarta Selatan : Salemba Medika

Sugiyono.2016. *Metode Penelitrian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

———2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta

Marie Tando Naomy. 2013. *Mutu Layanan Kebidanan Dan Kebijakan Kesehatan*. Manado : Presindo.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Jurnal dan Skripsi

Masruri dan Muazansyah imam .2017.*Analisis Efektivitas program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) (Studi kasus pada kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan)*.Governance and public policy.Vol.4. No.2.

Machfiroh Asfriqi.2015. *Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)Di Kota Palu*. jurnal katalog. Volume.3.

Pertiwi Monica, Nurcahyanto Herbasuki. 2009. *Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang*. INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial.

Rizal Bungkaes Heri, dkk. 2013. *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mayarakatdi Desa Mamahan Kabupaten Gemeh Kabupaten Kepulauan Taland.* Acta Diurna. Vol –

(-): 1-23.

Samsuddin Muhammad dkk.2014. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap*

Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretaris Sosial Di Kabupaten Kutai Timur. Administrasi Reform. Vol 1No.2.

Wayan Budiani Ni. 2007.*Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran KarangTaruna. Dempasar : Jurnal Ekonomi Dan Sosial*. InputVolume 2 No.1

Yudi Hartono Tri. 2016. *Efektivitas Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda.* E-jurnal administrasi negara, 4 (2).

Febri Yuliani Kartika. 2017.*Efektivitas ProgramPelayanan Kesehatan Gratis(P2KM) Di KotaBandarLampung.* Fakultas ilmu Sosial dan Politik. Universitas Lampung.